



■ Apel Awal Bulan Tahun 2015

# Gubernur Minta SKPD Tindaklanjuti Temuan BPK

pejabat di jajaran Pemprov Kalbar, agar opini Wajdat Tanpa Pengecualian (WTP) yang kita terima dapat kita pertahankan," pinta Gubernur, Senin (5/1), dalam sambutan yang dibacakan Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM, pad Apel Awal Bulan Tahun 2015 di Halaman Kantor Gubernur Kalbar.

PP nomor 3 tahun 2007, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). "Saya minta kepada seluruh SKPD di Lingkungan Pemprov Kalbar agar segera menyusun kedua laporan tersebut tepat waktu, dan selalu ....Ke Halaman .11

**Andika Lay**  
Harian Borneo, Pontianak

Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH meminta kepada para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menindaklanjuti Temuan BPK RI terkait dengan laporan keuangan dan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK RI. Tahun 2013 antara lain realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap, pencatatan dan penyajian aset tetap yang belum memadai, dan pengelolaan persediaan yang belum memadai.

"Hal ini, tentu saja memerlukan komitmen bersama dari penyusunan laporan keuangan, dan para



**Arahan**  
Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM saat memberikan arahan kepada peserta Apel saat menjadi Pembina Apel Awal Bulan Tahun 2015 di Halaman Kantor Gubernur Kalbar. FOTO Andika Lay / Harian Borneo.



## Gubernur Minta SKPD Tindaklanjuti Temuan BPK

check dan re-check atas substansi/materi laporan yang disusun oleh masing-masing SKPD," jelasnya.

Dikatakannya, berdasarkan Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Penggunaan Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Bendahara Umum (Kepala BPKAD) paling lambat 10 Januari.

SKPD yang belum menyampaikan laporan Pertang-

gunganjwabab Penggunaan Dana Tambahan Uang (TU), dan Uang Persediaan (UP) tahun 2014 berikut tanda bukti setoran sisa dana yang tidak digunakan, diminta segera menyampaikan laporan-nya. Apabila di SKPD masih terdapat sisa anggaran yang

tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai 31 Desember dan hingga sekrang belum disetorkan ke kas daerah. "Saya minta agar Saudara segera menyetorkan sisa dana tersebut agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari," ingatnya.